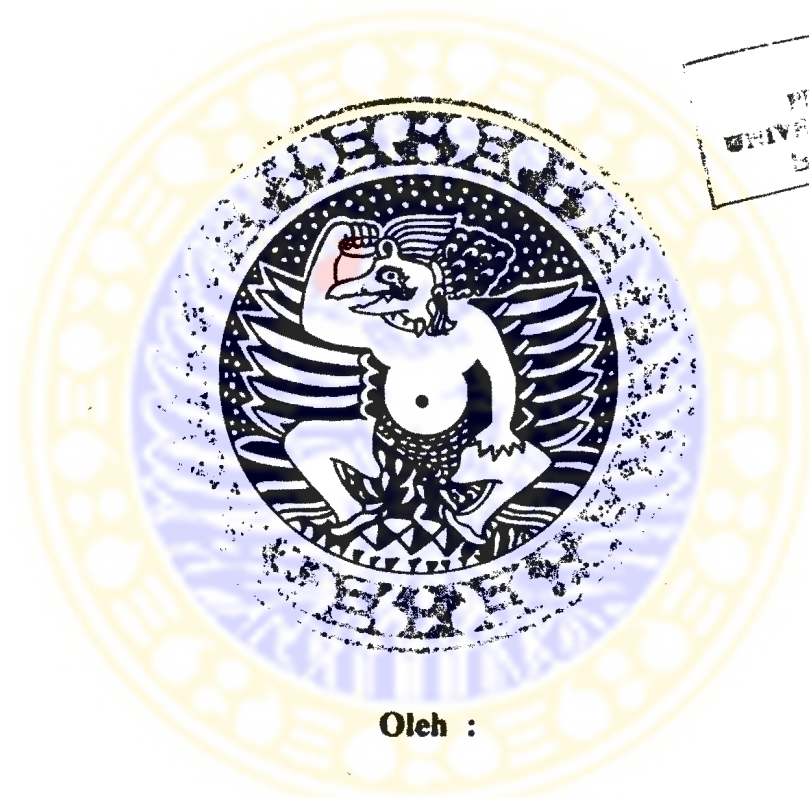


# **PARTISIPASI WARGA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS EKONOMI (PDM-DKE)**

**Suatu Tinjauan Antropologi Pembangunan  
di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Benowo, Surabaya**

## **SKRIPSI**



Oleh :

**JARYONO**

**079414397**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**Skripsi ini telah Diujikan di depan Dewan Penguji  
pada 18 Juni 2001**

**Ketua,**



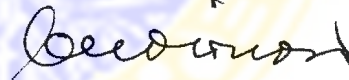
**Drs. Yusuf Ernawan, M.Hum**  
NIP. 131 836 998

**Anggota,**



**Dra. Pinky Saptandari, MA.**  
NIP. 131 569 349

**Anggota,**



**Drs. Bambang Budiono, M.Si**  
NIP. 131 801 407

## ABSTRAK

Krisis ekonomi secara langsung menyebabkan tingginya pengangguran, rendahnya pendapatan, dan rendahnya daya beli masyarakat. Untuk menanggulangi kondisi seperti ini sangat dibutuhkan suatu program darurat jangka pendek atau *crash program*. Salah satu program itu adalah program pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Ekonomi atau PDM-DKE. Pada program ini disalurkan dana yang sangat besar. Dana yang sangat besar ini seharusnya tidak hanya disalurkan dan kemudian hilang tak berbekas. Selayaknya dana itu selain untuk mengatasi keterpurukkan warga juga bisa untuk menumbuhkan partisipasi warga. Dari partisipasi warga diharapkan program ini bisa memberi dampak yang lebih besar dengan dana yang kecil dan juga menumbuhkan keberlanjutan program.

Ide tentang partisipasi sebetulnya memang tercantum secara tersirat dalam buku petunjuk pelaksanaan program PDM-DKE. Namun sebagai ide atau nilai baru, tentunya akan mendapatkan tantangan dan kendala dalam memperkenalkannya. Apalagi menghadapi mental warga dan birokrat yang terbiasa lamban dan tunggu perintah atasan serta kurang inisiatif. Dari keadaan ini maka peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana partisipasi ditumbuhkan dan dilaksanakan pada proses pelaksanaan program PDM-DKE. Data yang digali berupa ungkapan-ungkapan atau perkataan dari wawancara. Wawancara dilakukan pada masyarakat sasaran program dan pelaksana program pada tingkat desa atau kelurahan.

Dalam pelaksanaan program, ide atau nilai partisipasi yang diperkenalkan atau ditumbuhkan masih pada taraf dasar atau masih sederhana. Masih terdapat pandangan dan perilaku warga yang tidak partisipatif sebagai pengaruh dari masa orde baru. Birokrasi desa masih terlibat dan mendominasi dalam pelaksanaan program. Partisipasi yang berlangsung adalah partisipasi yang eksklusif dan terbatas di kalangan elit desa. Secara umum penentuan keputusan adalah dipihak elit desa. Warga memang diberi kesempatan untuk mengusulkan kegiatan usaha tapi keputusan tetap ada pada pihak elit desa. Partisipasi juga masih dipandang sebagai mobilisasi massa untuk mengikuti program. Di samping itu terdapat prasangka atau bias dalam mengidentifikasi siapa yang paling berhak menerima program. Pemilik usaha adalah penerima program mengabaikan warga yang tidak mempunyai usaha yang sebetulnya paling membutuhkan bantuan.

Pada tingkat masyarakat akar rumput sendiri, terdapat ketidakpedulian terhadap pelaksanaan program. Perhatian pokok adalah bagaimana agar dana itu cepat turun. Jangka waktu

pelaksanaan program yang pendek juga berpengaruh terhadap proses partisipasi. Waktu yang pendek dan target yang harus dicapai membuat seolah-program ini dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Hal ini membuat pelaksana program di tingkat kelurahan mengabaikan partisipasi warga dan hanya mengejar target.

